

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023**

**Oleh : Lisa Putri Amalia**

**Pembimbing: Rury Febrina**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## **ABSTRAK**

*Collaborative governance* menjadi sebuah kebutuhan esensial. Melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam penyusunan dan implementasi kebijakan keluarga berencana akan memastikan adanya kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini memiliki rumusan masalah “Bagaimana *Collaborative Governance* Program KB (Keluarga Berencana di Kabupaten Kamar Tahun 2023) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Collaborative Governance* Program KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Kabupaten Kampar Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar dengan fokus peeltian pada Dinas DPPKBP3A bersama dengan beberapa *Stakeholders* yang memiliki kepentingan dalam melakukan *Collaborative Governance* dalam Program Keluarga Berencana (KB). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah mengumpulkan data, menganalisis, mendeskripsikan data, dan menarik kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini adalah yaitu Kondisi Awal (*starting condition*) terdapat tingginya angka *unmet need*, adanya keikutsertaan beberapa aktor dalam *Collaborative Governance*, Ketidakseimbangan sumber daya, Kepemimpinan (*Facilititative Leaadership*) Terdapat cara dengan membangun kepercayaan antar *stakeholders*, kepemimpinan yang adil dan inklusif, Desain Kelembagaan (*institutional Desaign*) terdapat Transparansi dalam prosedur dan kebijakan, pengambilan keputusan yang kolektif, Proses Kolaborasi (*Collaborative process*) terdapat dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil kolaborasi.

**Kata Kunci : Collaborative Governance, Kondisi Awal, Kolaborasi, Keluarga Berencana**

## **ABSTRACT**

*Collaborative governance has become an essential need. Involving the government, the private sector, non-governmental organizations, and civil society in the formulation and implementation of family planning policies will ensure a comprehensive and integrated framework. This research has the problem formulation "How is the Collaborative Governance Program for Family Planning (KB) in Kampar Regency in 2023?" This study aims to describe the Collaborative Governance Program for Family Planning (KB) in Kampar Regency in 2023. The research method used in this study is a qualitative approach, the type of research used is descriptive, and the types of data used in this study are primary and secondary data. The location of this research was conducted in Kampar Regency with a focus on the DPPKBP3A*

*Office along with several stakeholders who have an interest in implementing Collaborative Governance in the Family Planning Program. (KB). The data collection technique in this research is through interviews and documentation. The data analysis technique involves collecting data, analyzing, describing the data, and drawing conclusions. The findings in this study are as follows: Initial Conditions (starting condition) include a high rate of unmet need, the involvement of several actors in Collaborative Governance, resource imbalance, Leadership (Facilitative Leadership) with methods such as building trust among stakeholders, fair and inclusive leadership, Institutional Design (institutional Design) with transparency in procedures and policies, collective decision-making, Collaborative Process (Collaborative process) with face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and collaborative outcomes.*

*Keywords: Collaborative Governance, Initial Conditions, Collaboration, Family Planning*

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga” yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan

hidup, meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan Sejahtera, meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas, menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan Pembangunan.

Ekstensi keluarga sejahtera merupakan sebuah tujuan dan harapan setiap manusia, karena merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keluarga sejahtera tidak dapat terwujud secara alami tanpa adanya tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam mengemban tugas dan peran masing-masing. Program KB (Keluarga Berencana) merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah melalui kebijakan publik, pemerintah diharuskan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara

optimal. Pemerintah menanamkan sistem otonomi daerah yang terjadi pada reformasi politik, terjadi pula program keluarga berencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai produksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Program Keluarga Berencana merupakan program yang ditaja oleh BKKBN, yang bertujuan untuk mengontrol jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Penduduk yang ada di Indonesia sudah cukup banyak, untuk itu pemerintah berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB). Berbagai hal yang dilakukan untuk menyuarakan terkait program KB agar seluruh rakyat Indonesia teredukasi dan menjadi lebih paham bagaimana pentingnya KB dalam mengontrol penduduk dan meningkatkan keluarga yang berkualitas. Di kota besar sudah banyak masyarakat yang melaksanakan program tersebut, namun tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat yang percaya akan pola pikir “banyak anak banyak rejeki”. Pola pikir seperti itu harus dihilangkan dalam masyarakat demi menciptakan keluarga yang berkualitas.

Namun jika kita lihat dalam lingkungan Masyarakat, masih banyak Masyarakat yang tidak mengikuti program ini, program keluarga berencana di Indonesia masih

terkendala beberapa faktor seperti peningkatan kualitas dan cakupan informasi serta penguatan keterlibatan Masyarakat (Rahma, 2015), peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi (Sudarniasih, dkk., 2016), kemudian karena kurangnya perhatian terhadap program KB (Surjadi, Charles, 2014). Dalam penyebaran informasi terkait program KB pada Masyarakat diperlukan kerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah, swasta ataupun *stakeholders* lainnya. Hal ini merupakan tindakan *Collaborative Governance*.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, *Collaborative Governance* menjadi sebuah kebutuhan esensial. Melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam penyusunan dan implementasi kebijakan keluarga berencana akan memastikan adanya kerangka kerja yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan cara ini, berbagai pihak dapat menyatukan kekuatan mereka untuk mengatasi tantangan, menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang lebih merata, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keluarga berencana. *Collaborative Governance* tidak hanya menciptakan sinergi di antara berbagai sektor, tetapi juga menggalang dukungan luas untuk mewujudkan perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku masyarakat terkait keluarga berencana.

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang menjalankan dan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan atau kegagalan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam program keluarga berencana tidak terlepas dari

adanya kolaborasi atas usaha pemerintah dalam meningkatkan keinginan Masyarakat untuk mengikuti program. Sehingga hal ini dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan program KB yang ada di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan daerah yang masih belum mencapai target dalam pelayanan proram KB terhadap Masyarakat sekitar. Maka dari itu perlu melakukan beberapa usaha demi meningkatkan kualitas KB, pelayanan, serta keluarga yang berkualitas dan berencana.

Capaian dari Program KB ini masih dikatakan rendah di Kabupaten Kampar, pada penggunaan suntik hanya mencapai dengan target 43,438 yang dicapai hanya 9.899 dengan persenan 22.79%, kemudian juga dalam penggunaan pil dengan target 12.758 yang dicapai hanya 5.346 dengan persenan 41.90%, penggunaan kondom dengan target 2.465 capaiannya hanya 1.394 dengan persenan 56.55%, penggunaan implan dengan target 7.563 yang dicapai hanya 3604 dengan persenan 47.65%, penggunaan IUD dengan target 2.512 yang dicapai hanya 345 dengan persenan 13.73%, penggunaan MOP dengan target 70 yang dicapai 0 hanya dengan persenan 0.00%, MOW dengan target 2.372 yang dicapai hanya 65 dengan persenan 2.74%, penggunaan MKT dengan target 1.105 yang dicapai hanya 0 dengan persenan 0.00%. Maka dari itu keseluruhannya dengan target 72.283 yang dicapai hanya 20.653 dengan persenan 28.57%.

Angka tersebut masih rendah di Kabupaten Kampar dengan target 72.283. Perlu adanya *Collaborative Governance*

yang lebih kuat untuk menggencarkan dan mengedukasi Masyarakat untuk bisa mengikuti program KB di Kabupaten Kampar, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat tema *Collaborative Governance* Program KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Kampar Tahun 2023. *Collaborative Governance* program KB (Keluarga Berencana) adalah program yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta mempromosikan perencanaan keluarga yang bertanggung jawab. Program ini bertujuan untuk mencapai tujuan KB nasional dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. *Collaborative Governance* program KB di Kabupaten Kampar, peran aktor-aktor seperti PLKB, TNI, Pemerintah Daerah, dan Dinas Kesehatan sangat penting dalam menjalankan program ini dengan sukses. Setiap aktor memiliki peran khusus yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan program KB. Adapun peran masing-masing actor dijelaskan dalam tabel berikut :

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa fenomena yang terjadi. Berikut fenomena masalah yang dapat dirincikan yaitu belum maksimalnya pelayanan program Keluarga Berencana (KB) dilihat dari target dan capaian Kabupaten Kampar dalam Program KB berdasarkan Data dari DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait pentingnya program KB di Kabupaten Kampar, masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan tenaga Penyuluh KB Kabupaten Kampar,

dengan fenomena masalah yang terjadi maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini tentang bagaimana ***Collaborative Governance Program KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Kampar Tahun 2023.***

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data atas penemuan-penemuan yang dibutuhkan sesuai atas kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati, yang mana pada dasarnya menjelaskan tentang apa yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yakni berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Ghony M, 2016) .

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar dengan lokasi utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu Wawancara yang dilakukan dengan informan data tingkatan *unmeed need* di kabupaten Kampar, data persenan rendahnya tingkat KB di kabupatten Kampar, lakip Dinas DPPKBP3A. Informan penelitian adalah Drs. Edi Afrizal, M.Si Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Dwi Andriani, SKM, M. Kes Kepala bidang Keluarga Berencana DPPKBP3A, Poppy Rahmadini, S.KM,

M.Si Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Serma Harianto Batiter Kodim 0313/kpr TNI Kabupaten Kampar, Ketua PLKB Kabupaten Kampar Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kabupaten Kampar, Ny Ricana Djayanti Hambali Ketua TP PKK Kabupaten Kampar.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kolaborasi pada dasarnya adalah interaksi, kerja sama, dan kompromi antara elemen-elemen yang saling terikat, baik itu antara organisasi, individu, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu kegiatan. Interaksi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kolaborasi, setiap elemen yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memperoleh manfaat serta hasil yang saling menguntungkan. Dengan adanya kolaborasi, sumber daya dan pengetahuan dapat disatukan, sehingga tercipta sinergi yang lebih besar dibandingkan jika bekerja secara individu. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi esensial dalam mencapai hasil yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, hingga komunitas sosial.

Ketika orang bekerja sama dalam suatu kolaborasi, ada beberapa nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat. Nilai-nilai ini termasuk kesamaan pendapat, kemauan untuk bekerja sama, dan kejujuran. Kesamaan pendapat tidak berarti semua orang harus berpikir sama, tetapi mereka harus memiliki visi dan tujuan yang serupa agar dapat bergerak dalam arah yang sama. Kemauan untuk bekerja sama adalah kunci utama, karena tanpa adanya niat dan usaha untuk bekerja bersama, kolaborasi tidak akan berhasil. Kejujuran juga penting, karena dengan

adanya transparansi dan kepercayaan, komunikasi dan koordinasi antar elemen akan lebih lancar, sehingga meminimalisir konflik dan kesalahpahaman.

Selain nilai-nilai tersebut, kasih sayang dan basis masyarakat juga merupakan aspek penting dalam kolaborasi. Kasih sayang di sini mencakup rasa saling menghargai, peduli, dan dukungan antara satu sama lain. Ketika individu bekerja dengan penuh kasih sayang, mereka lebih cenderung untuk membantu dan mendukung satu sama lain, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Basis masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan komunitas yang lebih luas. Artinya, hasil dari kolaborasi tidak hanya menguntungkan individu atau organisasi yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, kolaborasi yang didasari oleh nilai-nilai ini akan lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

## 1. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

### 1.1 Tingginya Angka *Unmeet Need*

*Unmet need* dalam konteks Keluarga Berencana (KB) adalah pasangan atau individu yang ingin menunda atau menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Situasi ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses ke layanan kontrasepsi, kurangnya informasi atau pengetahuan mengenai pilihan kontrasepsi yang tersedia, kekhawatiran tentang efek samping, serta hambatan sosial dan budaya yang menghalangi penggunaan kontrasepsi. Dampak dari *unmet need* sangat signifikan, berisiko terhadap kesehatan ibu

dan anak akibat kehamilan yang tidak diinginkan, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anak. Sebelum melakukan kolaborasi bersama lintas sectoral, kelompok Dinas DPPKBP3A melakukan pemantauan data dari sistem informasi keluarga, dan menemukan pasangan usia subur yang seharusnya ber KB tapi belum ber KB, dan ini sangat tinggi di Kabupaten Kampar.

*Unmet need* dalam program Keluarga Berencana (KB) sering kali disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks yang mempengaruhi keputusan individu atau pasangan dalam menggunakan kontrasepsi. Pertama-tama, keterbatasan akses menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan *unmet need*. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, layanan kesehatan dan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi terbatas, baik karena jarak yang jauh, infrastruktur yang kurang memadai, atau ketersediaan stok yang tidak konsisten.

Selain itu, kurangnya informasi atau pengetahuan tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia sehingga menyebabkan *unmet need*. Banyak individu atau pasangan mungkin tidak memahami secara lengkap atau benar tentang berbagai metode kontrasepsi yang ada, serta manfaat dan risiko yang terkait dengan masing-masing metode. Kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan KB dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang informasional atau tidak tepat. Efek samping dari metode kontrasepsi juga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menyebabkan *unmet need*. Beberapa individu mungkin memiliki kekhawatiran

terhadap efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan kontrasepsi tertentu, seperti perubahan berat badan, gangguan hormonal, atau risiko komplikasi kesehatan lainnya. Kekhawatiran ini dapat menghambat seseorang untuk mengadopsi metode kontrasepsi, meskipun metode tersebut mungkin efektif dalam mencegah kehamilan.

## 1.2 Aktor Collaborative Governance

Dalam upaya membangun kolaborasi yang kuat dan efektif dalam program Keluarga Berencana (KB), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar (DPPKBPPPA) telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci. Kolaborasi ini melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, TNI, PLKB (Pusat Layanan Keluarga Berencana), TP PKK (Tim Penggerak PKK), serta pemerintahan daerah setempat. Dalam kerangka ini, DPPKBPPPA bertindak sebagai koordinator utama, menyatukan visi dan tujuan bersama serta memfasilitasi koordinasi yang efektif antara semua pihak terlibat. Dalam upaya ini, DPPKBPPPA telah membangun platform komunikasi dan pertemuan berkala antara semua *stakeholders*, memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan. Dengan demikian, Dinas Kesehatan memberikan dukungan teknis dan sumber daya dalam hal layanan kesehatan reproduksi, sementara TNI memberikan pengawalan dan keamanan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Di sisi lain, PLKB dan TP PKK memberikan bantuan dalam hal pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya KB. Proses kolaborasi tersebut sangat banyak aktor yang terlibat yang memiliki tujuan sama terhadap program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, aktor

tersebut memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan tugas dan kegiatan mereka. Aktor yang terlibat memiliki tugas yang berbeda-beda, namun memiliki satu tujuan, seperti PLKB, TP PKK, Dinas Kesehatan, TNI, Pemerintahan Daerah, kemudian yang utamanya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Selain itu, pemerintah daerah juga membantu dalam mengoordinasikan berbagai instansi terkait dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi krusial dalam menjamin keberlanjutan program KB, membantu mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di lapangan. Kerjasama yang erat antara DPPKBP3A dan pemerintah daerah ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan program KB, tetapi juga memastikan bahwa program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup di Kabupaten Kampar. Pemerintahan daerah turut berperan aktif dalam memberikan dukungan kelembagaan dan administratif, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program KB. Melalui kerjasama yang sinergis ini, DPPKBPPPA dan stakeholder lainnya berusaha untuk memastikan bahwa program KB tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan penurunan angka kelahiran, tetapi juga berkelanjutan

dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Kabupaten Kampar secara keseluruhan.

### 1.3 Ketidakseimbangan Sumber Daya

- a. Pemerintah Daerah, dalam hal kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bersama dengan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang sangat dibutuhkan, pemerintah daerah dalam hal ini adalah aktor atau pejabat daerah yang berada di Kabupaten Kampar yaitu, baik ditingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, ataupun tingkat Desa, semua pemerintahan itu mengambil andil dalam membantu meningkatkan Program Keluarga Berencana sehingga melakukan kolaborasi bersama Dinas DPPKBP3A. Adapun terkait kelebihan/kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tentu ada, pemerintahan daerah tidak melakukan segala hal yang mereka sendiri tidak memahaminya, maka dari itu dibutuhkan kolaborasi yang mendalam. Kekuatan, pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam pengambilan kebijakan dan pengalokasian dana untuk program KB. Mereka dapat membuat regulasi yang mendukung dan mengarahkan implementasi program sesuai dengan kebutuhan lokal. Kelemahan, meskipun memiliki kekuatan dalam hal kebijakan dan pendanaan, pemerintah daerah mungkin mengalami kekurangan dalam sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman di lapangan. Selain itu, mereka mungkin juga

memiliki keterbatasan akses ke daerah terpencil, yang dapat menghambat pelaksanaan program di wilayah tersebut.

- b. TNI , tentara Nasional Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Kampar merupakan salah satu aktor yang ikut serta berpartisipasi dalam program yang dibuat oleh Pemerintah, kemudian dilaksanakan oleh DPPKBBP3A, sehingga DPPKBBP3A melakukan proses kolaborasi, salah satunya bersama dengan TNI. TNI merupakan aktor yang sangat membantu selama proses kolaborasi, Kekuatan, TNI memiliki kekuatan logistik dan keamanan yang signifikan. Mereka mampu menjangkau dan beroperasi di wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh pihak lain, termasuk daerah terpencil dan rawan konflik. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan yang krusial dalam pengamanan dan penyebaran program KB di seluruh wilayah. Kelemahan, Meskipun memiliki kemampuan logistik dan keamanan yang kuat, TNI mungkin tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan reproduksi dan layanan KB. Ini dapat membatasi efektivitas mereka dalam memberikan pendidikan dan layanan medis yang diperlukan.
- c. Lembaga Kesehatan, lembaga kesehatan dalam hal berkolaborasi dengan dinas DPPKBP3A adalah Dinas Kesehatan, dinas kesehatan merupakan aktor yang sangat penting



dalam proses kolaborasi, dinas kesehatan adalah salah satunya actor yang bisa menjalankan program KB, dengan pengetahuan yang sangat memahami KB, dan memiliki peralatan lengkap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kekuatan, Lembaga kesehatan, termasuk klinik, rumah sakit, dan penyedia layanan kesehatan lainnya, memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang diperlukan untuk memberikan layanan KB yang efektif. Mereka memiliki tenaga medis yang terlatih dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kelemahan, namun, lembaga kesehatan mungkin mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur dan peralatan medis. Mereka mungkin tidak memiliki cukup fasilitas atau sumber daya untuk menjangkau seluruh populasi yang membutuhkan layanan KB, terutama di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan dana juga bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk memperluas layanan mereka.

Ketidakseimbangan sumber daya ini dapat mempengaruhi dinamika kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Jika tidak diatasi, pihak yang memiliki lebih banyak sumber daya dan kekuatan dapat mendominasi kerjasama, sementara pihak yang memiliki sumber daya terbatas mungkin merasa terpinggirkan. Untuk itu, diperlukan komitmen untuk membantu pemangku kepentingan yang lebih lemah dan menyediakan insentif yang memadai

untuk memastikan partisipasi aktif dari semua pihak

### 2.1 Membangun Kepercayaan Antar Stakeholders

Kepercayaan adalah inti dari keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang dianggap benar atau penting dalam kehidupan mereka. Kepercayaan memberikan arahan dan ketenangan batin, karena seseorang merasa yakin akan hal-hal yang diyakininya. Hal ini juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, karena adanya kepercayaan dapat memperkuat keterikatan dan keandalan antarindividu serta dalam kerja sama sosial. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya menjadi landasan bagi nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga merupakan pondasi dalam membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Kolaboratif dalam program Keluarga Berencana, berbagai stakeholder memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan satu sama lain. TNI berfokus pada pengamanan dan dukungan dengan melakukan koordinasi serta memberikan keamanan, yang berkontribusi pada tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat. DPPKBPPPA berperan sebagai koordinator program dengan mengadakan forum diskusi dan pelatihan bersama, yang tercermin dalam jumlah kegiatan yang terencana dan terlaksana. Dinas Kesehatan menyediakan informasi dan layanan kesehatan, yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan tersebut. TP PKK berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi, yang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program. Sementara itu, PLKB bertanggung jawab atas pelaksanaan

program di lapangan, dengan indikator keberhasilan berupa jumlah peserta KB dan tingkat kepuasan mereka. Sinergi antara semua stakeholder ini sangat penting untuk mencapai tujuan program Keluarga Berencana secara efektif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menunjukkan integritas dan transparansi dalam mengelola program Keluarga Berencana (KB) dengan mengkomunikasikan kebijakan, alokasi dana, dan hasil program secara terbuka kepada semua aktor yang terlibat. Mereka juga mengakui dan menghargai kontribusi dari setiap pihak, baik melalui penghargaan resmi maupun apresiasi publik. Selain itu, pemerintah daerah mengoordinasikan upaya kolaboratif sehingga memastikan bahwa semua aktor merasa dihargai dan didengar, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Ini semua membantu dalam membangun kepercayaan dan kerjasama yang kuat di antara semua pihak yang terlibat dalam program KB.

**2.2 Kepemimpinan yang Adil dan Inklusif**  
Mengimplementasikan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah telah mengambil langkah signifikan untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil dan proporsional. Alokasi dana dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan kebutuhan masing-masing aktor yang terlibat, termasuk lembaga kesehatan kecil dan organisasi masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya menyediakan pendanaan yang cukup untuk mendukung berbagai aktivitas program, tetapi juga mengalokasikan anggaran secara proporsional sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan finansial. Dengan demikian,

lembaga Kesehatan yang mungkin memiliki keterbatasan dana operasional dapat tetap berpartisipasi aktif dalam program KB tanpa merasa terbebani.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar, pemerintah daerah telah memberi perhatian pada aspek pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari pendekatan *collaborative governance*, program pelatihan yang komprehensif diadakan untuk memastikan bahwa Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki kemampuan yang setara dalam hal penyuluhan dan manajemen program KB. Kegiatan pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkontribusi secara efektif ke dalam program. Pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para PLKB dan TP PKK secara signifikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa peserta pelatihan, mereka menyatakan bahwa sesi pelatihan membantu mereka memahami dengan lebih baik tentang berbagai aspek Program KB, dari teknik penyuluhan hingga pengelolaan dan evaluasi program.

### **3 Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)**

Desain kelembagaan (*institutional design*) merupakan pada aturan main yang mendasari proses kerjasama dalam suatu program atau organisasi. Aturan main ini mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang mengatur interaksi antara berbagai aktor yang terlibat. Sifat dari

institusi tersebut haruslah terbuka, yang berarti bahwa semua pihak memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berbagi informasi, dan berkolaborasi secara transparan. Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), tidak terdapat *Memorandum of Understanding* (MOU) kolaborasi formal yang secara spesifik mengatur mekanisme kerja *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* di sini merujuk pada kerja sama lintas sektor antara berbagai lembaga dan pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun demikian, program ini berjalan berdasarkan kesepakatan informal antar berbagai pihak, dengan kesamaan tujuan sebagai landasan utama. Setiap jajaran yang terlibat dalam program ini memiliki visi yang sejalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KB.

### 3.1 Transparansi dalam Prosedur dan Kebijakan

Transparansi adalah salah satu aspek terpenting dalam desain kelembagaan, terutama dalam konteks program kolaboratif seperti Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar. Transparansi dalam prosedur dan kebijakan memungkinkan semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas, serta mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terbuka, yang bisa diakses oleh semua aktor yang terlibat,

mulai dari lembaga kesehatan hingga organisasi masyarakat. Pertemuan rutin merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga agar semua pihak terinformasi dengan baik dan terlibat secara aktif dalam memberikan masukan. Pertemuan-pertemuan ini memungkinkan semua pihak, dari pemerintah daerah hingga penyuluh lapangan dan organisasi masyarakat, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai program, memahami perubahan kebijakan, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga menjamin bahwa setiap masukan dari para aktor diakui dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pelaksanaan program, sehingga memperkuat kolaborasi dan meningkatkan efektivitas intervensi Program KB di Kabupaten Kampar. Sebagai contoh, penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) menerima informasi terperinci mengenai distribusi alat kontrasepsi dan material penyuluhan melalui rapat-rapat ini. Informasi tersebut memungkinkan PLKB untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif di lapangan, memastikan bahwa layanan dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Transparansi dan keteraturan dalam penyampaian informasi ini membantu menciptakan koordinasi yang baik dan meningkatkan efektivitas keseluruhan dari program KB di Kabupaten Kampar.

### 3.2 Pengambilan Keputusan Kolektif

Penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar mengungkapkan bahwa integrasi berbagai

aktor seperti TNI, TP PKK, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), serta Dinas Kesehatan menjadi kunci sukses pelaksanaan program. Keterlibatan beragam aktor ini membantu dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan mendukung implementasi program secara efektif. Penelitian ini ditemukan bahwa forum diskusi dan rapat koordinasi yang rutin menjadi tempat vital untuk pertukaran informasi dan pengambilan keputusan. Misalnya, TNI sering terlibat dalam membantu distribusi logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, sementara PLKB bekerja langsung dengan masyarakat untuk penyuluhan dan pendampingan program. TP PKK, yang memiliki jaringan luas di komunitas lokal, berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana. DPPKBP3A dan Dinas Kesehatan, di sisi lain, menyediakan dukungan teknis dan pengawasan program.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa proses pengambilan keputusan yang inklusif ini memicu rasa kepemilikan yang lebih besar dan komitmen terhadap keputusan yang diambil. Dengan memiliki suara dalam keputusan penting, setiap aktor lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah sebelum mereka menjadi hambatan serius terhadap kemajuan program. Secara keseluruhan, *Collaborative Governance* dalam Program KB di Kabupaten Kampar telah membuktikan bahwa kerjasama dan koordinasi antar-sektor bisa sangat efektif dalam mengatasi tantangan yang kompleks. Integrasi kekuatan dan sumber daya dari berbagai

aktor tidak hanya meningkatkan kualitas dan cakupan program tetapi juga memperkuat hubungan antar lembaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program publik.

### **1. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)**

Proses kolaborasi dalam konteks pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang didesain untuk memfasilitasi dialog, koordinasi, dan interaksi aktif di antara pihak-pihak yang terlibat. Pertama-tama, terdapat pembukaan ruang untuk pertukaran ide dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat. Proses ini sering kali didukung oleh forum atau mekanisme partisipatif yang memungkinkan perwakilan dari kelompok-kelompok ini untuk berkontribusi secara konstruktif.

#### **4.1 Dialog Tatap Muka**

Tata kelola kolaboratif yang efektif sering kali didasarkan pada dialog tatap muka antara semua pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan pertemuan langsung di mana setiap stakeholder dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait dengan isu-isu yang mempengaruhi semua pihak. Keterlibatan ini memungkinkan transparansi dan pertukaran pandangan secara real-time, yang merupakan kunci dalam mengatasi tantangan dan mengidentifikasi solusi yang mungkin tidak terungkap melalui komunikasi tidak langsung seperti email

atau komunikasi virtual lainnya. Meskipun dialog ini sering kali menyingkap adanya perbedaan pendapat, karena setiap pihak cenderung ingin mempertahankan dan memperkuat posisi atau pandangan mereka, proses tatap muka tersebut penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.

#### **4.2 Membangun Kepercayaan / *Trust Building***

Kepercayaan antara para pemangku kepentingan merupakan aspek krusial namun seringkali paling menantang dalam setiap upaya kolaboratif. Kepercayaan ini tidak hanya penting untuk memulai kolaborasi tetapi juga untuk mempertahankannya jangka panjang. Karena setiap stakeholder membawa perspektif, sumber daya, dan tujuan yang berbeda ke dalam kolaborasi, kepercayaan menjadi fondasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja bersama secara efektif tanpa harus terus-menerus mempertanyakan motif atau komitmen masing-masing. Proses membangun kepercayaan ini memerlukan waktu dan sering kali dimulai dengan langkah-langkah kecil dalam kerja sama, di mana keberhasilan bersama dapat perlahan-lahan memperkuat percaya di antara para pihak. Namun, kurangnya kepercayaan dapat cepat sekali merusak potensi kolaborasi, karena tanpa itu, kesalahpahaman kecil bisa berkembang menjadi konflik yang menghambat kemajuan bersama. Langkah awal dalam membangun kepercayaan ini sering melibatkan transparansi dan komunikasi terbuka tentang visi, tujuan, dan harapan yang dimiliki oleh semua pihak. Pertemuan tatap muka rutin, misalnya, memberikan

kesempatan untuk dialog langsung dan memperdalam pemahaman bersama, yang merupakan kunci untuk memperkuat kepercayaan. Selain itu, ketika semua pihak dapat melihat kontribusi nyata yang dibawa masing-masing ke dalam kolaborasi, hal ini juga membantu mempercepat pembentukan kepercayaan. Untuk itu, penting bagi setiap stakeholder untuk secara aktif berpartisipasi dan menunjukkan komitmen mereka terhadap tujuan bersama.

#### **4.3 Komitmen terhadap Proses / *Commitment to Process***

Membangun komitmen dalam kolaborasi adalah kunci untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan upaya bersama. Komitmen ini bermula dari kesadaran bahwa setiap *stakeholder* saling bergantung satu sama lain untuk mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Proses pembangunan komitmen dimulai dengan pertemuan tatap muka antar stakeholders, di mana mereka saling bertukar pandangan dan mengidentifikasi tujuan bersama. Dialog ini tidak hanya membantu dalam memahami perspektif masing-masing tetapi juga dalam menegaskan kembali kepentingan bersama yang melampaui kepentingan individual atau kelompok. Dengan demikian, dialog tatap muka menjadi momen penting di mana kepercayaan dan komitmen mulai dibangun, menandai langkah awal dari kolaborasi yang efektif.

Akhirnya, keberadaan komitmen yang kuat antara *stakeholders* mampu mengatasi penghambat yang sering muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan. Komitmen ini mendukung pembagian tanggung jawab dan meningkatkan kerjasama, memungkinkan

setiap stakeholder untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Dalam lingkungan yang penuh komitmen, kepercayaan tumbuh dan membuahkan kolaborasi yang lebih produktif. Dengan berbagi tanggung jawab, para *stakeholders* dapat lebih mudah mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama, menjadikan kolaborasi tidak hanya sebagai alat yang efektif tetapi juga sebagai jalan menuju solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

#### **4.4 Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Dalam kolaborasi antar *stakeholders*, pengembangan pemahaman bersama adalah esensial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pemahaman ini bukan hanya terkait dengan pengetahuan faktual mengenai masalah yang dihadapi, tetapi juga melibatkan kesepakatan mengenai nilai-nilai, tujuan, dan metode yang akan digunakan dalam proses kolaborasi. Pemahaman bersama ini membantu semua pihak yang terlibat untuk menyelaraskan ekspektasi dan menyesuaikan langkah mereka dalam mengatasi permasalahan secara kolektif. Kesepakatan bersama terhadap tujuan dan nilai ini menciptakan fondasi yang kuat untuk partisipasi aktif semua *stakeholders*. Dengan adanya kesamaan arah dan tujuan, setiap stakeholder menjadi lebih berkomitmen untuk berkontribusi secara efektif. Partisipasi ini tidak sekadar fisik, tetapi juga intelektual dan emosional, di mana setiap stakeholder tidak hanya berbagi tanggung jawab, tetapi juga proaktif dalam mencari solusi, memberikan masukan, dan menerapkan keputusan yang telah disepakati. Dengan demikian, pemahaman

bersama ini tidak hanya memperkuat kerjasama tetapi juga mempercepat pencapaian hasil yang diharapkan, seraya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dari solusi yang diterapkan.

#### **4.5 Hasil Kolaborasi (*Intermediate outcomes*)**

Hasil Kolaborasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kampar

1. Penurunan *Unmet Need*, Salah satu hasil paling signifikan dari kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk TNI, adalah penurunan *unmet need* (kebutuhan yang tidak terpenuhi) dalam program KB dari 70% menjadi 24%. Dukungan yang diberikan oleh TNI dalam hal logistik dan keamanan memungkinkan tim penyuluh untuk mencapai daerah-daerah terpencil dan rawan konflik, sehingga layanan KB dapat lebih merata dan aksesibilitas masyarakat terhadap program ini meningkat.
2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Melalui advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang intensif, kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB dan kesehatan reproduksi meningkat. Program KIE yang didukung oleh TNI memastikan bahwa informasi yang benar sampai ke masyarakat luas, mengurangi mitos dan stigma terkait KB. Sebagai hasilnya, partisipasi aktif dalam program KB mengalami peningkatan yang signifikan.
3. Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB, Kolaborasi ini juga berhasil dalam pendayagunaan

tenaga penyuluh KB (PLKB). Dengan adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah, para PLKB mampu menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Dukungan TNI dalam pelatihan ini juga membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para PLKB.

4. Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi, Kerjasama dengan TNI sangat membantu dalam pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi. TNI menyediakan dukungan logistik yang penting untuk memastikan bahwa alat kontrasepsi sampai ke semua daerah, termasuk wilayah yang sulit dijangkau. Dengan distribusi yang lebih baik, layanan KB dapat lebih merata dan tepat waktu.
5. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Melalui pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, kolaborasi ini berhasil menciptakan jaringan dukungan yang kuat untuk program KB. Organisasi seperti TP PKK bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi dan pelayanan KB di tingkat desa dan kecamatan. Partisipasi aktif dari organisasi kemasyarakatan ini memperkuat dukungan lokal dan

memastikan bahwa pesan-pesan KB dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilakukan dalam program Berencana di Kabupaten Kampar, hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kolaborasi, yaitu Kondisi Awal (*starting condition*) terdapat tingginya angka *unmet need*, adanya keikutsertaan beberapa aktor dalam *Collaborative Governance*, Ketidakseimbangan sumber daya. Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*) terdapat cara dengan membangun kepercayaan antar stakeholders, kepemimpinan yang adil dan inklusif, Desain Kelembagaan (*institutional Deesaign*) terdapat Transparansi dalam prosedur dan kebijakan, pengambilan keputusan yang kolektif. Proses Kolaborasi (*Collaborative process*) terdapat dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, hasil kolaborasi. Kesimpulan pada penelitian ini adalah selama proses kolaborasi dilakukan, kolaborasi berjalan dengan lancar, dan kolaborasi yang dilakukan dapat meningkatkan program KB yang ada di Kabupaten Kampar walaupun proses kolaborasi ini tidak memiliki MOU atau SK Kolaborasi dalam proses *Collaborative Governance*, meskipun tidak ada MOU atau SK dalam proses ini tetap adanya kesepakatan namun tidak tertulis.

Sebaiknya dalam proses *Collaborative Governance* harus adanya surat seperti

MOU ataupun SK untuk mengatur segala bentuk kerjasamanya, kemudian sebaiknya Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mampu menjangkau ke arah pelosok meskipun tidak adanya pengawalan oleh TNI, dan sebaiknya Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mampu menjangkau perusahaan-perusahaan besar, sebaiknya Pemerintahan Daerah juga punya Tim khusus untuk melakukan program dibidang Kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau, February 2013, 339.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Fauzia, R. (2021). Rebranding Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Menyasar Generasi Millennial Dan Zillennial. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 175–188. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.1522>
- Ghony M, D. (2016). Jenis Penelitian Deskriptif. In *Metode Penelitian Kualitatif*. R-ruzz Media.
- Husaini Usman, 1950-, & Purnomo Setiady Akbar, 1956-. (n.d.). *Metodologi penelitian sosial*.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.
- Muhammad Noor, Falih Suaedi, A. M. (2022). Collaborative Governance suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik (M. R. F. dan F. Z. Yopiannor (ed.); Pertama). Bildung.
- Surjadi, Charles, B. T. S. (2014). *Tantangan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta. International Household Survey Network-Jurnal Kedokteran Atmajaya.
- Fitri Mutmainah, N., & Katon Mahendra, G. (2019). Collaborative Governance
- Ghony M, D. (2016). Jenis Penelitian Deskriptif. In *Metode Penelitian Kualitatif*. R-ruzz Media.
- Harmiati, Alexsnder, Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 65–76.
- Sudarniasih, Lilik, Sri Maryuni, A. E. (2016). Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan Wajok Hulu Kabupaten Mompawah. Pontianak. [jurnal.untan.ac.id%3Ejpmis%3Eart%0Aicle%3Eview](http://jurnal.untan.ac.id%3Ejpmis%3Eart%0Aicle%3Eview)
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung Kb Di Kabupaten Jombang. *CosmoGov*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan BKKBN No. 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana
- Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riiiau No. 1222/HU.02.02/JI/2022 Tentang Standar Pelayanan Program Keluarga Berencana Perrwakilan BKKBN



Provinsis Riau  
Dokumen Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Pemerdayaan  
Perempuan dan perlindungan anak  
(DPPKBP3A) Kabupaten Kampar  
Rencana Strategis DPPKBP3A  
Kabupaten Kampar  
Website Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Pemerdayaan  
Perempuan dan perlindungan anak  
(DPPKBP3A) Kabupaten Kampar